



BADAN PENGELOLA KAWASAN KEISTIMEWAAN SEGERA DIBENTUK

Tindak Tegas Pelaku Perusakan Pedestrian Malioboro

YOGYA (KR) - Sebagai bagian kawasan Keistimewaan, kawasan Malioboro memang perlu pengelolaan khusus. Dalam hal ini, Pemda DIY berencana untuk membuat Badan Pengelola Kawasan Keistimewaan (BPKK) termasuk di antaranya mengelola kawasan Malioboro yang difokuskan menjadi jalur semi pedestrian.

"Sebetulnya kawasan yang dibuat menjadi suatu daerah khusus sangat bagus kalau berada di dalam satu pengelola, kecuali kita sudah bisa terintegrasi. Supaya kawasan tersebut termonitor, terawasi oleh satu tangan tidak saling lempar kewenangan apabila terjadi ke-

rusakan, kotor, kumuh dan sebagainya," tutur Pelaksana Harian Unit Manajemen Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Program Prioritas (TP5) DIY Rani Sjamsinansi di Kompleks Kepatihan, Kamis (15/11).

Mantan Pjt Sekda DIY ini mencontohkan pengelolaan kawasan Borobudur menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dikelola Badan Otorita Borobudur sehingga tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan apabila terjadi permasalahan. Kawasan Malioboro sebetulnya memerlukan pengelola yang bisa diwujudkan dalam Badan Pengelola Kawasan Keistimewaan.

"Jika pengelola itu pen-

gelolaannya jelas apa yang harus dikelola maka seharusnya bisa mengelola kawasan Malioboro. Hanya kita tahu dengan keterbatasan pemerintah maka butuh SDM yang bisa mengelola," ujar Rani.

Rani menyarankan agar revitalisasi kawasan jalur semi pedestrian Malioboro baik dari *tangible* dan *intangible* dikerjakan bersama-sama. Pada akhir periode penataan kawasan tersebut, *intangible*-nya jadi yaitu manusianya yang sehari-hari berkuprah di kawasan Malioboro seperti pedagang kaki lima (PKL), pemilik toko, warga DIY yang sering ke Malioboro dan sebagainya.

Sementara itu, Asisten

Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Budi Wibowo menyatakan, saat terjadi kerusakan-kerusakan di kawasan sumbu filosof, termasuk pedestrian Malioboro harus ditindak tegas dan dilakukan proses hukum. "Adanya pelaku perusakan terhadap fasilitas yang ada di Kawasan Semi Pedestrian Malioboro tidak boleh dibiarkan," tandasnya.

Menurut Budi, keberadaan BPKK direalisasikan tahun 2019. Guna mewujudkan hal itu persiapan sudah mulai dilakukan di antaranya kantor badan pengelola di Gedung Indische Kompleks Kepatihan.

(Ira/Ria)-d



Sejumlah bolard tabung atau tiang pembatas di jalur pedestrian sisi timur kawasan Malioboro rusak.

KR/Fiza Nurfarida

anjut

nggapi

ahui

Netral Biasa Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005